
Upaya G20 Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Kawasan *Southern Hemisphere* Pasca Pandemi Covid-19*

Siti Nurjannah,¹ Aurelia Putri Noveri,² Nanda Putri Khalifah,³
Ida Susilowati⁴

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

 [10.15408/jlr.v4i5.28515](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28515)

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has become a terrible pandemic and has an impact on the global economic crisis, including the southern hemisphere. Solidarity, collaboration and cooperation among southern countries are demands in fighting the economic crisis due to the Covid-19, one of which is through the G-20. This is shown by the G20 in the theme carried out in 2022, namely "Recover together, recover stronger" through strengthening global solidarity. This study aims to analyze the efforts of the G20 in encouraging the economic recovery of the southern hemisphere countries, during the Covid-19 pandemic. Descriptive-qualitative research method is used in analyzing the issue, accompanied by data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the G20 has attempted several ways to encourage post-pandemic economic recovery in the southern hemisphere, through: International Financial Architecture, Financial Sector Reform, Sustainable Finance. Infrastruktural, and International Taxation.

Keywords: Covid-19; Economic Crisis; G-20; Southern Hemisphere

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

¹ **Siti Nurjannah** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: sitinurjannah41@student.hi.unida.gontor.ac.id

² **Aurelia Putri Noveri** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: aurelia.putri8013@mhs.unida.gontor.ac.id

³ **Nanda Putri Khalifah** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: nanda.putri8062@mhs.unida.gontor.ac.id

⁴ **Ida Susilowati** adalah dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ditetapkan sebagai pandemi di akhir tahun 2020 dan telah menyebar ke seluruh negara-negara dunia di pertengahan tahun 2021. Hingga akhir September 2022 ini, data kasus covid-19 yang terkonfirmasi oleh WHO sebanyak 614.385.693 kasus dimana sebanyak 6.522.600 terkonfirmasi meninggal dunia.⁵ Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada keamanan kesehatan global, tapi juga berdampak terhadap krisis ekonomi dunia hingga ancaman resesi global. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada negara-negara berkembang namun juga berdampak terhadap negara-negara maju, seperti; Singapura, Korea Selatan, Jepang, USA, Selandia Baru, Inggris, dan Prancis.⁶

Setiap negara menerapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi pandemic covid-19, diantaranya melakukan upaya lockdown, karantina wilayah, penutupan jalur transportasi darat, laut dan udara hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Sejumlah industri terpaksa membatasi produksi dan aktifitas masyarakat dikurangi, sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Negara-negara ASEAN juga terdampak dari kebijakan-kebijakan masa post-pandemi (*social & physical distancing*), yang memicu munculnya resesi perekonomian yang mengakibatkan laju ekonomi Kawasan ASEAN terhambat.⁷ Hal tersebut, menuntut negara-negara untuk dapat menyusun kebijakan yang tepat, supaya para pelaku ekonomi dapat tetap bertahan untuk mencegah munculnya disparitas pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 berawal dari negara China, salah satu negara-negara blok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan). Hal tersebut, cukup berdampak pada perekonomian negara-negara besar tersebut. Brasil salah

⁵ World Health Organization, Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic: Press Conference on Covid 19 and Other Global Health Issues, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

⁶ Komunikasi, B. (2022, January 08). *Menko Luhut Sampaikan Pentingnya Tiga Isu Utama G20 bagi Pemulihan Ekonomi Dunia*. Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-sampaikan-pentingnya-tiga-isu-utama-g20/>

² Negeri, K. L. (2021, December 17). *Nilai Strategis Transformasi Digital Dalam Misi Pulih Bersama Presidensi G20*, Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3469/berita/nilai-strategis-transformasi-digital-dalam-misi-pulih-bersama-presidensi-g20-indonesia>

⁷ Azzahra Aulia Dewi dkk, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Di Negara ASEAN*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5 No. 3, Juli 2021, hal. 673.

satunya, mengalami peningkatan angka pengangguran dan diperkirakan ekonomi Brasil turun 8% akibat pandemi (2020). Sementara Rusia mengalami kemerosotan ekonomi pada 2020 hingga 6% menurut prediksi Bank Dunia dan 6,6% menurut prediksi IMF. Serupa dengan India yang mengalami defisit fiskal hingga 5,5-6% PDB akibat penanganan covid-19 di negaranya.⁸

Dampak pandemic covid-19 tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tapi berdampak pada hampir seluruh negara di dunia termasuk negara-negara *southern hemisphere*. Krisis ekonomi hingga ancaman resesi turut menjadi fenomena negara-negara selatan. Begitu juga negara-negara anggota G-20 juga mengalami resesi ekonomi akibat kebijakan lockdown yang diterapkan di masa pandemi covid-19. Pasalnya, kebijakan lockdown berdampak pada penurunan produksi dan berkurangnya angka permintaan pasokan yang mengakibatkan krisis ekonomi negara-negara G20, yang disebut IMF dengan istilah '*The Great Lockdown*.'⁹ Dampak pandemi covid-19 cukup luas dan memiliki efek domino terhadap bidang-bidang lainnya.

Pandemi covid-19 menuntut negara-negara selatan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan menciptakan peluang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi *southern hemisphere*. Kebijakan makro ekonomi berupa Deklarasi Presidensi G20 mengarah pada upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana upaya G-20 dalam mendorong pemulihan perekonomian negara-negara selatan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya-upaya yang diterapkan G20 dalam mendorong kembali laju ekonomi pasca pandemi covid-19, khususnya di negara-negara selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data studi pustaka dengan metode sistematik review digunakan dalam penelitian ini, di mana penulis merangkum beberapa jurnal yang relevan dengan judul yang dibahas. Konsep kerjasama multilateral dalam penguatan keamanan manusia di era pandemi, dijadikan

⁸ Samdysara Saragih, *Begini Dampak Covid-19 pada Ekonomi di Negara-Negara BRICS*, Bisnis.com 09 Juli 2020, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200709/19/1263477/begini-dampak-covid-19-pada-ekonomi-di-negara-negara-brics>

⁹ Tirta Citradi (2020, 01 May), *Terjangkit Corona Ekonomi Negara G-20 Luluh Lantak*, CNBC Indonesia News, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501104434-4-155688/terjangkit-corona-ekonomi-negara-g-20-luluh-lantak>

alat dalam menganalisa isu tentang bagaimana upaya G-20 dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di negara-negara Southern Hemisphere.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerjasama Multilateral Dalam Penguatan Keamanan Manusia di Era Pandemi

Sejak Perang Dingin, tatanan politik dan hubungan internasional mengalami evolusi dari *hard power* menuju *soft power*. Setiap negara berusaha menunjukkan eksistensinya dalam politik internasional, baik negara-negara maju maupun berkembang. Interdependensi antar negara, mendorong negara-negara untuk mengakomodir kepentingan nasionalnya dalam menjawab tantangan di era globalisasi. Hal tersebut menciptakan upaya kerjasama internasional, baik dalam bentuk bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama regional tidak terlepas dari kerangka permasalahan yang dihadapi di setiap kawasan, yang termanifestasi dalam kerjasama bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.¹⁰ Kerjasama regional juga termasuk sebagai kerjasama multilateral, yang membedakan adalah cakupan kawasan para anggotanya. Kerjasama regional hanya beranggotakan negara-negara di kawasannya, sementara kerjasama multilateral dapat diikuti negara dari kawasan manapun. Diantara kerjasama multilateral adalah OKI, G-15, WTO, G-20, Gerakan Non-Blok, D-8¹¹ dan masih banyak lainnya.

Kajian keamanan internasional mengalami pergeseran, dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional atau modern. Keamanan tradisional mengukung negara sebagai aktor utama dalam keamanan internasional yang erat kaitannya dengan ancaman militer, sementara keamanan modern memposisikan manusia atau aktor-aktor non-negara sebagai aktor keamanan internasional yang memfokuskan kajian pada ancaman non-militer. UNDP mengkategorikan keamanan manusia berdasarkan tujuh elemen, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat dan politik.¹² Pandemi covid-19 merupakan isu keamanan

¹⁰ Mahendra, Yustika Citra. (2020). *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi Kasus ASEAN dalam Permasalahan Human Security)*. *Jurnal Transformasi Global*, hal. 65-80.

¹¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Daftar Kerjasama Multilateral*, Portal Kemenlu RI, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/95/kerjasama_multilateral

¹² Sonny Sudiar. (2018-2019), *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2 Oktober-Maret, hal. 152.

kesehatan yang berimbas kepada komponen keamanan lainnya, salah satunya adalah keamanan ekonomi.

Interdependensi global mengarahkan setiap negara untuk aktif berperan dalam kerjasama internasional, mengingat urgensi kerjasama multilateral terhadap kepentingan nasional negara-negara anggota. Berbagai Kerjasama multilateral formal maupun informal dibentuk sebagai mencapai kepentingan nasional anggota-anggotanya di bidang keamanan manusia, seperti; UNDP yang fokus dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, melalui pengembangan kebijakan dan kemitraan antar negara.¹³ WHO sendiri bergerak di bidang keamanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan, untuk mencapai kesehatan global yang lebih baik melalui kerjasama antar negara anggota.¹⁴ Sementara G-20, sebagai salah satu bentuk kerjasama multilateral informal yang merupakan forum ekonomi utama dunia, untuk mencari solusi terkait permasalahan ekonomi yang dihadapi negara-negara dunia.¹⁵

Kerjasama ekonomi pembangunan menjadi trend dalam kerjasama internasional saat ini, salah satunya dalam penguatan keamanan manusia. Pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi kerjasama multilateral saat ini, terutama dalam menghadapi krisis keamanan ekonomi global. Covid-19 telah memberikan dampak yang berimbas ke sektor-sektor penting lainnya, diantaranya sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi.

2. G-20 Sebagai Wujud Kerjasama Multilateral Negara-Negara Perekonomian Kuat Dalam Penguatan Keamanan Ekonomi Negara-Negara Selatan

Urgensi kerjasama multilateral saat ini terlihat dari kerjasama ekonomi pariwisata antar negara, seperti antara Indonesia dengan India, Pakistan, dan Bangladesh yang menyumbang surplus neraca perdagangan melalui jumlah wisatawan di kawasan negara-negara selatan. Kerjasama antar negara-negara kawasan Asia yang bersifat komplementer tersebut perlu ditingkatkan untuk memacu ekonomi perdagangan dengan negara-negara tersebut.¹⁶

¹³ UNDP, misi UNDP, diakses dari <https://www.undp.org> pada 10/10/2022, 11:56 WIB

¹⁴ WHO, Our Works, diakses dari <https://www.who.int/our-work> pada 10/10/2022, 12:19 WIB

¹⁵ SHERPA G20 Indonesia, *Sejarah Singkat G20*, Senin, 10 Oktober 2022, diakses dari <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>

¹⁶ Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Asia Selatan dan Tengah 2020-2024*. *Jurnal Diplomasi*, 135-150.

Pergeseran paradigma keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional tidak terlepas dari asumsi, bahwa keamanan tradisional (militar) dianggap belum berhasil memberikan keamanan masyarakatnya. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara keamanan negara dan pembangunan manusia.¹⁷ Hal tersebut, menuntut negara-negara bekerjasama dengan negara lainnya untuk mencapai keamanan manusia di negaranya. G-20 merupakan forum kerjasama multilateral di bidang ekonomi pembangunan yang bersifat global, untuk mencari solusi permasalahan ekonomi global yang dihadapi negara-negara maju dan berkembang saat ini.¹⁸

Diantara agenda prioritas jalur keuangan G-20 dalam menjaga keamanan ekonomi, adalah melalui:¹⁹ (a) *Exit Strategy to Support recovery*, yang membahas upaya proteksi G20 terhadap negara-negara berkembang yang berusaha memulihkan ekonomi dari efek *exit policy* yang diterapkan oleh negara-negara maju, yang telah memulihkan ekonominya lebih dahulu., (b) *Adressing Scarring Effect to Secure Future Growth*, untuk mengatasi dampak krisis berkepanjangan melalui peningkatan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, serta memperhatikan persoalan tenaga kerja, rumah tangga, sektor korporasi dan keuangan., (c) *Payment system in Digital Era*, yaitu standar pembayaran lintas batas negara dan prinsip-prinsip perkembangan Central Bank Digital Currency (CBDC)., (d) *Sustainable Finance*, yang membahas resiko iklim dan resiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta *sustainable finance* dari sudut pandang makro-ekonomi dan stabilitas keuangan., (e) *Financial Inclusion melalui Digital Financial Inclusion dan SME Finance*, yang dilakukan melalui pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas kaum perempuan, pemuda dan UMKM sebagai upaya mendukung ekonomi keuangan inklusif yang bersifat lintas batas., dan (f) *International Taxation*, yang membahas perpajakan internasional terkait dengan implementasi Framework bersama OECD, tentang strategi perencanaan pajak atau disebut *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

¹⁷ Hidayat Chusnul Chotimah dkk, *Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security*, Jurnal Transformasi Global, Vol. 4 No. 1, hal. 65.

¹⁸ Retno Nur Indah. (2022), *Apa Itu G-20 Dan Manfaatnya Untuk Indonesia*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 20 Februari 2022, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>

¹⁹ Presidensi G20 Indonesia 2022. (2022). *Agenda Prioritas Jalur Keuangan Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022*, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/g20/default.aspx>

3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keamanan Ekonomi Negara-Negara Selatan (*Southern Hemisphere*)

Pandemi Covid-19 memberi tekanan di sektor ekonomi, khususnya di negara-negara *southern hemisphere*. Kurang memadainya sistem kesehatan dan layanan terhadap masyarakat yang belum optimal, disertai rendahnya standar hidup di negara-negara *southern hemisphere* yang relatif padat penduduk telah mengakibatkan negara-negara selatan mengalami ancaman ekonomi yang cukup signifikan.²⁰ Negara-negara *global south* seringkali berorientasi pada peningkatan ekspor, yang dihadapkan pada tekanan ekonomi akibat rendahnya permintaan global.

Penyebaran pandemi Covid-19 menuntut pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik menerapkan kebijakan *lockdown*. Kebijakan tersebut justru berdampak pada keamanan ekonomi negara, salah satunya peningkatan angka pengangguran sekaligus penurunan pendapatan di seluruh wilayah.²¹ Selain itu, kebijakan *lockdown* juga menyebabkan tidak sedikit perusahaan gulung tikar yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja di negara-negara kawasan Asia-Pasifik mengalami penurunan sebesar 3,2% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Nominasi negara dengan angka penurunan tenaga kerja terbesar diraih India, yang mengalami penurunan sebanyak 30,4 juta pada tahun 2020.²² Diantara para pekerja yang dinilai rentan akan dampak ekonomi akibat covid-19 adalah pekerja perempuan. Covid-19 dinilai cukup berdampak para sektor-sektor ekonomi perdagangan yang banyak dilakukan oleh pekerja perempuan, baik di sektor formal maupun informal.²³ Hal tersebut meningkatkan angka pengangguran yang memicu ancaman resesi global.

²⁰ Departemen Komunikasi. (2022, May 12). *Kontribusi dan Peran Indonesia dalam Presidensi G20*, Bank Indonesia Bank Central Indonesia: Cerita BI, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Kontribusi-dan-Peran-Indonesia-dalam-Presidensi-G20.aspx>

²¹ Siaran Pers No: 2020/154/EAP. (2020, 30 Maret). *Asia Timur dan Pasifik: Negara-Negara Harus Bertindak Sekarang Untuk Mengurangi Guncangan Ekonomi dari Covid-19*, The World Bank IBRD IDA: Berita. Diakses dari <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/03/30/east-asia-and-pacific-countries-must-act-now-to-mitigate-economic-shock-of-covid-19>

²² Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, August 18). *Kajian Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respon Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-a>

²³ Supartinah & Ahmad Anwar. (2021). *Pandemi dan Krisis Multidimensi: Studi Kasus Permasalahan Gender di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1, hal. 39.

Pandemi Covid-19 berdampak multi-sektor dan meningkatkan ancaman keamanan ekonomi global, baik negara-negara di benua Eropa, Amerika, Australia, Asia dan Afrika. Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, dalam symposium nasional keuangan negara tahun 2020, memaparkan hasil penelitian keduanya bahwa jika dibuat ranking kawasan-kawasan yang terdampak covid-19 paling berat terhadap perekonomian mereka, maka kawasan Asia menduduki ranking pertama yang terkena dampak terberat di bidang ekonomi akibat pandemi covid-19. Disusul dengan Amerika, Afrika, Eropa dan terakhir Australia²⁴. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara southern hemisphere merupakan kawasan yang paling terdampak covid-19 di sektor keamanan ekonomi. Keberhasilan negara-negara G-20 diharapkan dapat mengatasi krisis ekonomi dan mampu memulihkan ekonomi dengan segera, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian global.

4. Upaya G20 Dalam Dorong Pemulihan Perekonomian Negara-Negara Selatan (Southern Hemisphere) Pasca Pandemi Covid-19

Pada tanggal 31 Oktober 2021, KTT G-20 yang diselenggarakan di Roma menyepakati tema '*Recover Together, Recover Stronger*' dan memilih Indonesia sebagai presidensi G-20 tahun 2022. Indonesia dalam presidensi G-20 memprioritaskan 3 agenda, yaitu arsitektur Kesehatan global, transformasi ekonomi digital dan ketiga adalah transisi energi. Sementara komunike G-20 mencanangkan 6 agenda, yaitu terkait perekonomian dan kesehatan global, design atau arsitektur keuangan internasional, isu-isu terkait sektor ekonomi, keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dan perpajakan internasional.²⁵ Hal-hal tersebut menjadi fokus bahasan G-20 tahun 2022, dimana kesepakatan akhirnya akan dideklarasikan dalam KTT G-20 di Bali pada bulan November 2022.

Kolaborasi negara-negara G-20 terselenggara dalam beberapa pertemuan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global pasca pandemi covid-19. Diantara upaya yang dilakukan G-20 dalam memulihkan ekonomi negara-negara selatan, adalah melalui program:

²⁴ Dedi Junaedi & Faisal Salistia. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*, dalam Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jurnal Ekonomi, hal. 1011.

²⁵ Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, (2022, 21 Februari), *Pesan Kunci Forum G-20*, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia: KPPN Padang. Diakses dari <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/padang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3033-forum-g20.html>

a. International Financial Architecture

Sebagai tim kerja G-20 yang difokuskan untuk memperkuat komitmen dukungan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan, International Financial Architecture Working Group (IFAWG) menerapkan 5 hal pokok, yaitu:²⁶

Pertama, IFAWG mendorong penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) IMF oleh negara-negara yang dinilai memiliki potensi finansial eksternal yang kuat, melalui *IMF Resilience and Sustainability Trust* (RST). Hal tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan respon dalam menanggulangi permasalahan bantuan dana jangka panjang dan untuk menghadapi pandemi covid-19 serta *climate change*.

Kedua, mendukung agenda pembangunan melalui peningkatan peran Multilateral Development Bank (MDBs), dengan tetap mempertimbangkan kapastian dan tata kelola MDB yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya inovasi system pembiayaan.

Ketiga, menguatkan kebijakan sistem keuangan di negara-negara berkembang melalui pengembangan *Macro Financial Stability Policy Framework* (MFSPF) oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dan *Integrated Policy Framework* (IPF) oleh IMF, untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan southern hemisphere. Diharapkan melalui kerangka kebijakan MFSPF dan IPF, negara-negara berkembang dapat memahami interaksi dari kebijakan-kebijakan berupa fiscal, moneter, makro-prudensial, nilai tukar, dan kebijakan pengelolaan aliran modal.

Keempat, melakukan assesmen terhadap negara-negara berkembang yang rentan hutang dengan penguatan tata kelola pinjaman dana bagi negara-negara yang rentan hutang tersebut.

Kelima, IFAWG juga menekankan urgensi pendataan hutang yang transparan, sebagai upaya tanggung jawab pembiayaan berjamin terutama bagi negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah.

²⁶ Kementerian Keuangan Indonesia. (2022, May 26). *G20 Dorong Pemulihan Ekonomi di tengah Eskalasi Tantangan Global*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-g20-dorong-pemulihan-ekonomi-di-tengah-eskalasi-tantangan-global/>

b. Financial Sector Reform

Pandemi Covid-19 menjadi ujian sekaligus tantangan besar bagi stabilitas keamanan ekonomi pasca krisis keuangan global sejak 2008. Diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat terkait fiscal dan moneter untuk krisis ekonomi pasca pandemic Covid-19, untuk mencapai stabilitas system keuangan negara. Hal tersebut selaras dengan rencana reformasi system keuangan yang dibahas dalam KTT G-20 tahun 2022, salah satunya yang dibahas IFAWG terkait upaya memulihkan kembali ekonomi global melalui intermediasi keuangan yang kuat dan seimbang.²⁷

Sebagai upaya mengatasi ketakutan terhadap krisis ekonomi pasca covid-19, Indonesia berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menstimulus kembali kegiatan usaha masyarakat melalui UMKM dan membuka kembali sektor pariwisata. Hal tersebut untuk memicu Kembali pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi covid-19, melalui pendapatan daerah di sektor pariwisata yang dikolaborasikan dengan usaha ekonomi masyarakat menengah.²⁸ Hal tersebut selaras dengan roadmap G-20 dalam meningkatkan sektor keuangan lintas negara dan mendorong pemulihan ekonomi global.

c. Sustainable Finance

Dalam pertemuan Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang digelar pada 25 Januari 2022, Indonesia turut mendorong terwujudnya *sustainable finance* khususnya bagi negara-negara selatan untuk mencapai agenda 2030 sekaligus target dari *Paris Agreement*. Hal tersebut selaras dengan topik utama forum G-20, yaitu mewujudkan *sustainable finance* yang mudah diakses, mengembangkan transisi keuangan, dan meningkatkan komitmen Lembaga keuangan yang kredible untuk membantu pasar ekonomi dan transisi ekonomi global. Diantara upaya-upaya tersebut adalah dengan menyusun harga yang pantas untuk mewujudkan pembiayaan net-zero dan lainnya.

²⁷ Fadhilah Bilqis, A. d. (2021). *COVID-19 Di Asia Tenggara: Kebijakan Negara, Respon ASEAN, dan Implikasinya di Kawasan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

²⁸ Defia Riski Anggarini. (2021), *Kontribusi UMKM Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*, *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 2 July, hal. 345.

d. Pembangunan Infrastructure

Agenda terkait pembangunan infrastruktur telah dibahas G-20 dalam *Infrastructure Working Group* (IWG) pertama, pada tanggal 20-21 Januari 2022. Negara-negara G-20 menyepakati dan mendukung adanya pembangunan infrastruktur yang menekankan pada peningkatan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang inklusif dan *resilient*, serta pemanfaatan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan antara lain, melalui:

Pertama, mendorong partisipasi sektor swasta untuk meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan sebagai kunci pembangunan infrastruktur berkelanjutan pasca COVID-19. Diperkirakan sekitar 53% emisi gas rumah kaca global berasal dari konstruksi dan operasional infrastruktur, sehingga OECD memprediksi bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2030, dibutuhkan sekitar USD 6,9 triliun investasi infrastruktur.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan kerjasama negara-negara G-20 dan MDB untuk mewujudkan hal tersebut guna memulihkan ekonomi global.

Kedua, mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, untuk menekankan pentingnya peran infrastruktur dalam mengurangi risiko kesenjangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. OECD menjelaskan bahwa 60% dari investasi public adalah tanggung jawab negara-negara G-20 melalui pemerintahnya, dalam menunjang pemulihan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Ketiga, Meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur, sebagai tuntutan aktifitas selama pandemi covid-19. Tercatat bahwa dalam satu decade terakhir, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020 hingga 10,2%.³⁰ Tantangan yang dihadapi negara-negara selatan adalah keterbatasan akses di wilayah mereka, sehingga dibutuhkan kebijakan strategis untuk meningkatkan infrastruktur digital dan adopsi teknologi. Presidensi Indonesia dalam G-20 2022, mengusulkan terkait metode pembiayaan infrastruktur digital sebagai respon dari peningkatan penggunaan infra-tech selama pandemi covid-19.

²⁹ Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Kajian Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respon Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-a>

³⁰ Ibid

Keempat, Mendorong infrastruktur transformatif pasca COVID-19. Berdasarkan analisa InfraTracker tahun 2021 yang mencapai hasil transformatif jangka panjang, presidensi G-20 mengusulkan supaya InfraTracker dapat memberikan wawasan lebih luas tentang strategi dan rencana infrastruktur jangka panjang.

Secara umum, negara-negara G-20 telah menyepakati tentang implementasi infrastruktur berkelanjutan dan berkualitas melalui kerjasama dalam revitalisasi infrastruktur, untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca covid-19 sekaligus menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan menengah. Selain itu, negara-negara G-20 juga menekankan kembali komitmen para anggota, dalam meningkatkan infrastruktur digital dan investasi teknologi untuk meminimalisir kesenjangan pelayanan di berbagai sektor.

e. International Taxation

Dalam rangka menuju transparansi pajak, 11 negara (*Asian Development Bank* (ADB), Bank Dunia, Indonesia, India, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Thailand, Singapura) menyepakati untuk inter-change data dan informasi melalui penandatanganan Deklarasi Bali.³¹ Sementara *Secretariat of Global Forum* menginisiasi program *Asia Initiative* yang bertemakan '*Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency*', untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota untuk terlibat aktif dalam program transparansi pajak yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu; (a) *Program jangka pendek*, dengan memfasilitasi transparansi pajak untuk optimalisasi income dalam negeri guna mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19., dan (b) *Program jangka panjang*, dengan strategi melawan penghindaran dan *unacceptable tax practices* oleh negara-negara anggota.

Untuk mengatasi penggelapan/penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak nasional yang kondusif, diperlukan sistem yang adil dan transparan dalam perpajakan. Indonesia menjadi adalah salah satu negara yang menerapkan kebijakan transparansi pajak untuk pembiayaan

³¹ Kementerian Luar Negeri. (2022, 1 April). Nilai Strategis Transformasi Digital Dalam Misi Pulih Bersama Presidensi G20 Indonesia. Beranda Kementerian Luar Negeri: Indonesia Untuk Dunia, Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3469/berita/nilai-strategis-transformasi-digital-dalam-misi-pulih-bersama-presidensi-g20-indonesia>

infrastruktur pembangunan negara, namun kebijakan tersebut memerlukan kesepakatan internasional yang mendukung realisasi program *international taxation*. Namun, potensi tersebut akan terealisasi apabila terdapat kesepakatan internasional.

D. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak multi-sektor bagi negara-negara di dunia, termasuk negara-negara kawasan *southern hemisphere*. Berbagai kebijakan juga ditetapkan guna mengurangi laju penyebaran virus COVID-19, diantaranya adalah kebijakan *lockdown*. Kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian negara-negara selatan dan mempengaruhi perekonomian global. G-20 dengan tema "*Recover together, recover stronger*" berupaya untuk memulihkan Kembali laju ekonomi negara-negara southern hemisphere melalui beberapa cara, antara lain; (a) *International financial architecture*, dengan cara mendorong penyaluran SDR, meningkatkan peran MDB, menguatkan kebijakan system keuangan negara-negara berkembang, menguatkan tata kelola pinjaman dana bagi negara-negara yang rentan hutang, dan mendafta hutang secara transparan, (b) *Financial sector reform* melalui intermediasi keuangan antar negara, (c) *Sustainable finance*, salah satunya dengan menyusun harga yang pantas untuk mewujudkan pembiayaan net-zero, (d) *Pembangunan infrastruktur*, antara lain melalui partisipasi sektor swasta, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui inklusi social, meningkatkan infrastruktur digital dan mendorong infrastruktur transformative, (e) *International taxation* untuk mewujudkan transparansi pajak yang adil. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas ekonomi global.

REFERENSI:

- Anggarini, Defia Riski. (2021), *Kontribusi UMKM Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*, Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 July.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, August 18). *Kajian Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respon Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-a>

- Badan Komunikasi. (2022, January 08). *Menko Luhut Sampaikan Pentingnya Tiga Isu Utama G20 bagi Pemulihan Ekonomi Dunia*. Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-sampaikan-pentingnya-tiga-isu-utama-g20/>
- Bilqis, Fadhilah, A. d. (2021). *COVID-19 Di Asia Tenggara: Kebijakan Negara, Respon ASEAN, dan Implikasinya di Kawasan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Chotimah, Hidayat Chusnul dkk, *Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security*, Jurnal Transformasi Global, Vol. 4 No. 1.
- Citradi, Tirta (2020, 01 May), *Terjangkit Corona Ekonomi Negara G-20 Luluh Lantak*, CNBC Indonesia News, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501104434-4-155688/terjangkit-corona-ekonomi-negara-g-20-luluh-lantak>
- Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Asia Selatan dan Tengah 2020-2024*. Jurnal Diplomasi.
- Departemen Komunikasi. (2022, May 12). *Kontribusi dan Peran Indonesia dalam Presidensi G20*, Bank Indonesia Bank Central Indonesia: Cerita BI, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Kontribusi-dan-Peran-Indonesia-dalam-Presidensi-G20.aspx>
- Dewi, Azzahra Aulia dkk, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Di Negara ASEAN*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5 No. 3, Juli 2021.
- Indah, Retno Nur. (2022), *Apa Itu G-20 Dan Manfaatnya Untuk Indonesia*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 20 Februari 2022, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>
- Junaedi, Dedi & Faisal Salistia. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*, dalam Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jurnal Ekonomi, hal. 1011.
- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. (2022, 21 Februari), *Pesan Kunci Forum G-20*, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia: KPPN Padang. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/padang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3033-forum-g20.html>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, May 26). *G20 Dorong Pemulihan Ekonomi di tengah Eskalasi Tantangan Global*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-g20-dorong-pemulihan-ekonomi-di-tengah-eskalasi-tantangan-global/>
- Kementerian Luar Negeri. (2021, 17 Desember). *Nilai Strategis Transformasi Digital Dalam Misi Pulih Bersama Presidensi G20*, Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3469/berita/nilai-strategis-transformasi-digital-dalam-misi-pulih-bersama-presidensi-g20-indonesia>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Daftar Kerjasama Multilateral*, Portal Kemenlu RI, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/95/kerjasama_multilateral
- Kementerian Luar Negeri. (2022, 1 April). *Nilai Strategis Transformasi Digital Dalam Misi Pulih Bersama Presidensi G20 Indonesia*. Beranda Kementerian Luar Negeri: Indonesia Untuk Dunia, Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3469/berita/nilai-strategis-transformasi-digital-dalam-misi-pulih-bersama-presidensi-g20-indonesia>
- Mahendra, Yustika Citra. (2020). *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi Kasus ASEAN dalam Permasalahan Human Security)*. *Jurnal Transformasi Global*.
- Presidensi G20 Indonesia 2022. (2022). *Agenda Prioritas Jalur Keuangan Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022*, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/g20/default.aspx>
- Saragih, Samdysara. (2020). *Begini Dampak Covid-19 pada Ekonomi di Negara-Negara BRICS*, *Bisnis.com* 09 Juli 2020, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200709/19/1263477/begini-dampak-covid-19-pada-ekonomi-di-negara-negara-brics>
- SHERPA G20 Indonesia, *Sejarah Singkat G20*, Senin, 10 Oktober 2022, diakses dari <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>
- Siaran Pers No: 2020/154/EAP. (2020, 30 Maret). *Asia Timur dan Pasifik: Negara-Negara Harus Bertindak Sekarang Untuk Mengurangi Guncangan Ekonomi dari Covid-19*, The World Bank IBRD IDA: Berita. Diakses dari <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/03/30/east-asia-and-pacific-countries-must-act-now-to-mitigate-economic-shock-of-covid-19>

Sudiar, Sonny. (2018-2019), *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2 Oktober-Maret.

Supartinah & Ahmad Anwar. (2021). *Pandemi dan Krisis Multidimensi: Studi Kasus Permasalahan Gender di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1.

UNDP, misi UNDP, diakses dari <https://www.undp.org> pada 10/10/2022, 11:56 WIB

WHO, Our Works, diakses dari <https://www.who.int/our-work> pada 10/10/2022, 12:19 WIB

World Health Organization, Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic: Press Conference on Covid 19 and Other Global Health Issues, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>